

Prabowo Paparkan Sebab Pangkas, Anggaran Belanja Tak Produktif untuk Efisiensi: Kalau Tidak, Jadi Korupsi

Aa Ruslan Sutisna - SUKABUMI.WARTAWAN.ORG

Mar 20, 2026 - 12:08



Prabowo Paparkan Sebab Pangkas Anggaran Belanja Tak Produktif untuk Efisiensi: Kalau Tidak, Jadi Korupsi

matasosial.com, Jakarta, 19 Maret 2026 - Presiden RI Prabowo Subianto blak-blakan mengenai alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja anggaran negara yang tidak efisien oleh pemerintahannya. Dalam siaran "Presiden Prabowo Menjawab" bersama para pakar dan jurnalis, ia menegaskan bahwa

efisiensi besar-besaran adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.

Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat dana sebesar Rp308 triliun. Ia meyakini, jika dana tersebut tidak segera dipotong, maka akan membuka celah korupsi.

"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," jelas Prabowo, dalam tayangan Kamis (19/3).

Prabowo mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Ia menyebut ICOR Indonesia berada di angka level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).

Tingginya angka ICOR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain. Dengan APBN yang mendekati Rp3.700 triliun (US\$230 miliar), Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30% atau setara US\$75 miliar.

"Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau US\$230 miliar. 30% itu maka US\$75 miliar. Ini tidak efisien," lanjutnya.

Prabowo menyebut efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya baru tahap awal. Ia menilai masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial. Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.

Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.

Dalam menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi dalam berbagai sektor. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang diterapkan di negara lain, seperti pengurangan hari kerja hingga penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).

"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," tambah Prabowo.